

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan aset dunia dengan jutaan pohon yang berada didalamnya dan memberikan asupan oksigen bagi umat manusia. Akan tetapi kondisi hutan hari ini mengalami banyak masalah. Menurut sumber resmi dari *Food And Argiculture Organization* (FAO), dalam laporan tentang kehutanan pada tahun 2010, secara global terdapat sekitar 13 juta hektar lahan hutan yang telah dikonversi setiap tahun antara tahun 2000 sampai 2010 dengan tujuan yang beraneka ragam seperti pertanian, pertambangan dan industri.¹ Lebih dari sepertiga dari total hutan tersebut diklasifikasikan sebagai hutan primer dengan ekosistem paling kaya spesies dan beraneka ragam di dunia.² Luas hutan primer ini diperkirakan sekitar 39% dari jumlah total hutan dunia akan tetapi jumlah hutan primer menurun sekitar 40 juta hektar atau berkurang sekitar 0,4 persen setiap tahunnya.³

Sementara itu menurut sumber yang dihimpun oleh *British Broadcasting Corporation*(BBC), dari tahun 2000 sampai 2012 bumi kehilangan hutan dengan luas sama dengan wilayah Mongolia. Pohon-pohon tersebut digambarkan dapat menutupi enam kali luas wilayah Inggris dan dalam periode tersebut bumi kehilangan lahan hutan diakibatkan oleh penebangan hutan, penyakit, serta bencana alam.⁴

Indonesia merupakan negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo, yang mana jumlah lahan hutan di Indonesia mencapai 126.302.229,98 ha yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Luas tersebut terbagi kedalam hutan

¹Food And Argiculture Organization Of the United Nations , *Forest Biodiversity Risk*, <http://www.FAO.org/news/story/en/item/45904/icode/> (diakses pada 5 November 2016)

²*ibid*

³*ibid*

⁴BBC Indonesia, *Kerusakan Hutan*, [http://www.BBC.com/majalah/2013/11/13115_iptek_pengetahuan](http://www.BBC.com/majalah/2013/11/13115_ipitek_pengetahuan), (diakses pada 3 November 2016)

lindung (29.637.565,72 ha), hutan produksi terbatas (26.844.201,26 ha), hutan produksi tetap (29.265.407,73 ha), hutan produksi yang dapat dikonversi (13.120.714.00ha), dan kawasan suaka alam dan pelestarian alam (27.434.342,27 ha)⁵.

Akan tetapi, jumlah lahan hutan di Indonesia terus mengalami penurunan, menurut data yang didapat dari World Wide Fund For Nature (WWF), dalam rentan waktu, antara tahun 1970 sampai tahun 2000, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2,8 juta ha per tahun dan pada saat ini luas hutan Indonesia yang tersisa hanya tinggal 28% dari total hutan Indonesia yang ada.⁶ Hal tersebut diakibatkan oleh penebangan liar, kebakaran dan pembakaran hutan, kegiatan penambangan dan peralihan fungsi hutan.⁷ Sementara menurut penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal *Nature Climate Change* pada 29 Juli 2014, bahwa pada rentan waktu 2000-2012, Indonesia kehilangan 6,02 juta ha hutan setiap tahunnya dan melampaui Brazil sebagai negara “perusak hutan” nomor satu di dunia.⁸

Sementara itu hutan-hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan juga mengalami kerusakan yang sangat parah dan menyebabkan deforestasi (hilangnya lahan hutan). Dari penelitian yang dilakukan oleh WWF dan dikutip dari BBC, hutan Sumatera dan Kalimantan termasuk kedalam 11 wilayah dunia yang berkontribusi terhadap lebih dari 80% deforestasi secara global hingga tahun 2030.⁹ Sementara itu kerusakan hutan yang terjadi di Papua juga

⁵ Pusat data dan informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014*, hal 99

⁶ WWF Indonesia, *Hutan Indonesia Penyerap atau Pelepas Emisi Gas Rumah Kaca* http://awsassets.wwf.or.id/downloads/lembar_fakta_deforestasi_tanpa_foto.pdf (diakses pada 7 November 2016)

⁷ *ibid*

⁸ Berita lingkungan, *Laju Kerusakan Hutan di Indonesia Lampaui Brazil*, <http://www.beritalingkungan.com/2014/07/laju-kerusakan-hutan-di-indonesia.html> (diakses pada tanggal 13 Maret 2017)

⁹ BBC Indonesia, *Hutan Sumatera dan Kalimantan Sumbang Deforestasi Global*, http://www.BBC.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_sains_hutan (diakses pada tanggal 21 Februari 2017)

sangat tinggi, di mana, pada tahun 2009-2011 Papua telah kehilangan 143.680 ha hutan yang diakibatkan oleh ekspansi industri, pertanian dan pertambangan.¹⁰

Salah satu kawasan hutan yang mengalami kerusakan cukup parah adalah kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau yang diresmikan menjadi taman nasional pada tanggal 19 Juli 2004. Setelah itu pada tanggal 15 Oktober 2009 luas taman nasional tersebut ditambah oleh Menteri Kehutanan saat itu menjadi 83.068 ha¹¹. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ini merupakan hutan dataran rendah yang tersisa di Provinsi Riau yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan rumah bagi 360 Flora yang terbagi kedalam 165 marga dan 57 suku lalu didalamnya juga terdapat 107 jenis burung, 23 jenis Mamalia 3 jenis Primata, 50 Jenis Ikan, 15 jenis Reptilia dan 18 jenis Amfibi.¹² Akan tetapi, dari total luas kawasan hutan tersebut, pada saat ini hanya tersisa sekitar 23.000 ha hutan yang utuh sisanya telah dijarah oleh masyarakat yang berasal dari luar daerah Riau yang bermukim disana dan mereka menjadikan sebagian kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi perkebunan sawit.¹³ Akibat kerusakan dari tahun ke tahun tersebut, puncaknya pada tahun 2014 Provinsi Riau menjadi Provinsi dengan kerusakan hutan konservasi tertinggi di Indonesia dan kerusakan, hutan di Taman Nasional Tesso Nilo menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab tingginya deforestasi di Provinsi Riau tersebut.¹⁴

Parahnya kerusakan hutan di Tesso Nilo juga disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mencaplok kawasan taman hutan nasional ini dan mereka sebagian besar tidak

¹⁰Green Peace Indonesia, *Surga Papua yang Semakin Terancam*, <http://www.greenpeace.org//seasia/id/blog/blog/36462/> (diakses pada 21 Februari 2017)

¹¹Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Pelalawan, *Taman Nasional Tesso Nilo*, <http://www.pelalawantourism.com/potensiwisata/view/17> (diakses pada tanggal 16 April)

¹²*ibid*

¹³Liputan 6, *60 persen kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di jajah pendatang*, <http://regional.liputan6.com/read/2581531/60-persen-kawasan-taman-nasional-tesso-nilo-dijajah-pendatang> (diakses pada tanggal 16 April 2017)

¹⁴Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014*, Jakarta

mempunyai izin untuk mengelola hutan negara ini. Pada tahun ini saja, data awal dari pihak kepolisian daerah Riau menyebutkan bahwa total terdapat 71 perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan 13 diantaranya beroperasi di kawasan inti dari Taman Nasional Tesso Nilo, Kapolda Riau selaku pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ini mengatakan 13 perusahaan tersebut melanggar tiga undang-Undang diantaranya adalah undang-undang kehutanan, perkebunan, dan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.¹⁵

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat angka kerusakan hutan di Indonesia cukup tinggi hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pembiaran atau kurangnya sikap yang tegas dari negara sebagai pembuat kebijakan dalam mencegah kerusakan hutan di wilayahnya, meski di Indonesia sendiri mempunyai undang-undang yang mengatur tentang pencegahan kerusakan hutan salah satunya pada UU no 18 tahun 2013 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup akan tetapi dalam kenyataannya banyak dari pelanggar hukum tersebut tidak merasakan hukuman dari perbuatan yang mereka kerjakan, seperti contoh kasus di 2008, pihak kepolisian menerbitkan SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan hutan secara masif di Provinsi Riau.¹⁶ Hal tersebut mendorong lahirnya organisasi-organisasi non negara yang berkontribusi dalam pencegahan hutan di Indonesia, sesuai dengan apa yang dikatakan kaum liberal bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dapat terlibat pada aksi-

¹⁵Liputan 6, *71 Perusahaan beroperasi di kawasan Lindung Gajah Sumatera*, <http://regional.liputan6.com/read/2850089/71-perusahaan-beroperasi-di-kawasan-lindung-gajah-sumatera> (diakses pada tanggal 22 Mei 2017)

¹⁶Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau & Indonesia Corruption Watch, *Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) Atas 14 Perusahaan IUPHHKHT di Provinsi Riau*, <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Eksaminasi%20Publik/hasileksaminasipubliksp3kehuatanriau.pdf> (diakses pada tanggal 22 Mei 2017)

aksi sosial dengan skala lokal maupun global dan menurut kaum liberal pun aktor non-negarapun menjadi aktor yang berperan penting dalam sistem internasional.¹⁷

Salah satu organisasi yang peduli terhadap masalah kerusakan hutan di Indonesia adalah WWF, organisasi ini adalah sebuah organisasi non pemerintah yang berskala internasional yang berfokus pada masalah konservasi penelitian dan restorasi lingkungan.¹⁸ Selain itu WWF adalah organisasi independen terbesar di dunia dengan lima juta orang di seluruh dunia bekerja sebagai pendukung 1300 kegiatan-kegiatan konservasi WWF di lebih dari 100 negara di dunia. WWF pertama kali berbadan hukum pada tanggal 23 November 1961 di Swiss dan pada November 1961 organisasi ini mempunyai kantor cabang di Inggris, kemudian di Amerika Serikat pada Desember 1961.¹⁹

WWF Internasional merupakan sekretariat bagi seluruh jaringan global WWF yang berada di dunia, yang berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator bagi 40 kantor WWF di seluruh dunia, mengingat WWF sendiri memiliki banyak perwakilan di masing-masing negara. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan kebijakan dan prioritas, penjalinan kemitraan global, dan pengembangan kampanye internasional mengenai konservasi alam. Struktur dari keanggotaan WWF Internasional sendiri terdiri dari International Board of Trustees yang memiliki kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan WWF serta mengamandemen statuta. Namun tidak seluruh anggota dari WWF dapat menjadi bagian dari Board of Trustees.

WWF sendiri telah banyak melakukan berbagai kegiatan restorasi hutan di berbagai belahan dunia seperti Brazil (hutan Amazon), Kenya (Masai mara national reserve), hutan-hutan di wilayah Kanada, AS, Rusia termasuk Indonesia (hutan Sumatera dan Kalimantan).

¹⁷Robert Jackson dkk, *Pengantar studi HI*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal 175

¹⁸WWF, *About WWF*, <http://www.panda.org/where we work/project> (diakses pada tanggal 17 Februari 2017)

¹⁹*ibid*

Restorasi hutan tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, NGO lokal, masyarakat dan negara²⁰.

WWF mulai berkiprah di Indonesia pada tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional. Pada tahun 1996, WWF resmi berstatus yayasan dan menjadi sebuah entitas legal, yang berbadan hukum sesuai ketentuan di Indonesia. Prof. Emil Salim, Pia Alisjahbana dan Harun Al Rasjid (alm) menjadi pendorong berdirinya Yayasan WWF Indonesia, menempatkannya sebagai organisasi nasional dalam Jaringan Global WWF, yang memiliki dewan penyantun sendiri, independen dan fleksibel dalam penggalangan dana dan pengembangan program.²¹

WWF di Indonesia menjadi organisasi yang paling aktif dalam pengurangan kerusakan hutan dengan melakukan berbagai macam kegiatan pro lingkungan. WWF menyentuh hampir diseluruh kawasan Indonesia, hingga saat ini cabang WWF Indonesia berjumlah 28 kantor perwakilan yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia dan merupakan satu-satunya organisasi non-negara yang berskala global yang fokus pada masalah lingkungan hidup yang memiliki banyak cabang di daerah dan terintegrasi kedalam WWF Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa WWF adalah organisasi lingkungan hidup terbesar yang ada di Indonesia, dibandingkan dengan organisasi lingkungan hidup lainnya, WWF mampu menjangkau ke lebih banyak daerah karena memiliki perwakilan yang cukup banyak.

Salah satu perwakilan WWF Indonesia terdapat di Provinsi Riau, salah satu provinsi di wilayah Indonesia bagian barat yang mempunyai permasalahan hutan yang banyak. WWF Indonesia sendiri mempunyai program-program khusus di daerah konservasi hutan Taman

²⁰ *ibid*

²¹ WWF Indonesia, *Sejarah Kami*, http://www.wwfIndonesia.org/tentang_wwf/whoweare/sejarah/ (diakses pada tanggal 28 Oktober 2016)

Nasional Tesso Nilo ini. Hal tersebut tidak terlepas dari kekayaan hayati di kawasan ini sementara angka kerusakannya semakin tinggi serta kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nillo ini merupakan benteng terakhir dari spesies-spesies langka yang dilindungi oleh undang-undang.²²

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh WWF sebagai organisasi non negara berskala global yang bergerak di bidang lingkungan hidup dalam mengatasi kerusakan hutan di Indonesia khususnya di kawasan Taman Nasional Tesso Nillo. Dalam penelitian ini akan di bahas bagaimana upaya WWF dalam permasalahan hutan dan bagaimana upaya mereka merangkul negara atau pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi dalam mencegah kerusakan hutan, selain itu mereka juga akan berupaya merangkul perusahaan-perusahaan dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat merusak lingkungan dan yang terakhir mereka juga akan berupaya merangkul masyarakat agar dapat merubah pola pikir dan tradisi yang salah tentang lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Hutan Indonesia mempunyai kontribusi besar bagi manusia di dunia karena memberikan asupan oksigen yang besar, akan tetapi keadaan hutan Indonesia pada saat ini telah berada di fase yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang didapat dari WWF pada rentan tahun 1970-2000 kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2,8 juta ha per tahun dan pada saat ini luas hutan Indonesia hanya tersisa 28% dari jumlah total hutan Indonesia, data lain menyebutkan bahwa Indonesia telah menjadi negara pengrusak hutan nomor satu di dunia. Salah satu kawasan di Indonesia yang mengalami kerusakan hutan cukup parah adalah Taman Nasional Tesso Nillo yang berada di kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Kawasan

²²WWF Indonesia Program Riau, *Sekilas Taman Nasional Tesso Nill*, <http://www.wwf.or.id/?22500/Sekilas-Taman-Nasional-Tesso-Nilo> (diakses pada tanggal 22 April 2017)

yang didalamnya mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia serta menjadi benteng terakhir bagi spesies-spesies langka ini telah dirusak dan dialih fungsikan seluas 60 persen dari jumlah total lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nillo. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan Provinsi Riau menjadi provinsi dengan angka kerusakan hutan konservasi tertinggi di Indoneisa.

Berangkat dari permasalahan diatas muncul sebuah organisasi International non-negara yang peduli terhadap permasalahan ini. Organisasi ini bernama WWF, sebuah organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang memiliki 28 kantor perwakilan yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Maka dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai upaya yang dilakukan WWF dalam mengatasi kerusakan hutan di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis akan mengangkat sebuah pertanyaan penelitian yakni: **Bagaimana upaya yang dilakukan oleh WWF dalam mengatasi kerusakan hutan di di Taman Nasional Tesso Nillo?**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh WWF dalam mengatasi permasalahan kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nillo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu hubungan internasional Universitas Andalas.

2. Sebagai referensi bagi studi Hubungan internasional mengenai peran WWF dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nillo.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi, dalam penelitian ini kami mengambil lima buah referensi dengan tema dan subjek penelitian yang hampir sama akan tetapi memiliki cara pembahasan yang berbeda.

Referensi pertama yang penulis jadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Mella Darnasari pada tahun 2013 yang berjudul Peran WWF Dalam Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) di Kawasan Heart Of Borneo.²³ Dalam jurnal ini Mella menggambarkan tentang peranan WWF dalam melakukan konservasi di sebuah taman nasional yang berada di kawasan *Heart of Borneo* yang mana daerah yang tergabung di dalam kawasan tersebut juga menjadi perhatian oleh dua negara lainnya yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian ia menggambarkan peran WWF sebagai fasilitator, sebagai pengelola, sebagai pembina, sebagai inisiator dan sebagai media penelitian pada kasus konservasi hutan di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM).

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada konsep dan teori yang digunakan. Penelitian diatas menggunakan konsep konservasi, konsep ekowisata dan konsep organisasi internasional sementara penelitian yang peneliti bahas menggunakan konsep ENGO melalui upaya ENGO yang dipaparkan oleh Paul Wapner.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul peran *greenpeace* dalam menanggulangi masalah kerusakan hutan alam dan gambut di Riau, Sumatera (Studi kasus PT. Riau Andalan Pulp And Paper) yang ditulis oleh Sarah, seorang mahasiswa Ilmu

²³Mella Darnasari, *Peran WWF dalam konservasi Taman Nasional Kayang Mentarang (TNKM) di kawasan Heart of Borneo*, Jurnal HI FISIP Universitas Mulawarman, (2013), Vol 1 nomor 4

Hubungan Internasional Universitas Negeri Riau pada tahun 2013.²⁴ Pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa kebakaran hutan menyumbang seperlima dari total keseluruhan emisi gas rumah kaca secara global dan Indonesia menjadi Negara terbesar ke tiga yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca yang berasal dari pembakaran hutan tersebut. Berangkat dari fakta tersebut. Salah satu perusahaan swasta yang berkaitan erat dengan masalah hutan ini yaitu PT. Riau Andalan Pulp And Palm merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan industri yang terletak di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini ia menjelaskan tentang kebutuhan bahan baku kayu yang sangat tinggi untuk memproduksi kertas mengingat PT tersebut merupakan perusahaan nomor dua terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pengadaan kertas. Sementara itu, bahan baku yang tersedia cukup sedikit karena lahan yang dijadikan sebagai pemasok bahan baku relatif kecil dan pertumbuhannya relatif lambat. Hal tersebutlah yang menjadikan kekhawatiran dari pihak *Greenpeace* terhadap permasalahan hutan di Riau, karena cepat atau lambat pihak perusahaan akan berusaha mendapatkan izin untuk mengelola hutan negara yang berpotensi mengakibatkan rusaknya hutan di kawasan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada objek penelitian, penelitian ini lebih menekankan peranan *Greenpeace* dalam menyelamatkan hutan Indonesia dari perusahaan-perusahaan yang berniat untuk memanfaatkan hutan Indonesia untuk kepentingan mereka dan peneliti lebih berfokus pada upaya *Greenpeace* pada satu aktor saja yaitu perusahaan sementara penelitian penulis menggambarkan upaya dan peran WWF dalam menjaga hutan Indonesia tidak hanya kepada perusahaan saja tetapi juga menekankan perlindungan hutan pada negara dan juga masyarakat.

²⁴ Sarah, *Peran Greenpeace dalam menanggulangi masalah kerusakan hutan alam dan gambut di Riau, Sumatera* (Studi kasus PT. Riau Andalan Pulp And Paper), Jurnal HI FISIP Universitas Munawarman, (2013), Vol 1 nomor 3

Jurnal selanjutnya yang menjadi acuan penulis dalam skripsi ini ialah sebuah jurnal yang ditulis oleh Dinda Ismaya mahasiswa HI Universitas Riau dengan judul peran WWF dalam mencegah penyelundupan satwa liar di Indonesia,²⁵ dalam jurnal ini ia membahas tentang peran WWF dalam mencegah penyelundupan satwa liar di Indonesia. Seperti penelitian penulis, ia mendeskripsikan peranan WWF secara umum di Indonesia dalam mencegah penyelundupan satwa liar.

Di jurnal ini ia menuliskan pada latar belakang tentang kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia ia menambahkan bahwa spesies yang ada di Indonesia jumlah berkurang pesat dan salah satu penyebabnya adalah rusak dan hilangnya lahan hutan yang terjadi di Indonesia dan menyebabkan konflik antara binatang dan manusia yang berujung terjadinya perburuan yang dilakukan oleh masyarakat.

Di bagian pembahasan ia juga menjelaskan secara umum fungsi dan peranan WWF dalam mencegah terjadinya penyelundupan satwa liar di Indonesia sebagai motivator, komunikator, perantara, keorganisasian dan legislatif. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada masalah yang melatarbelakangi suatu penelitian, disini ia menjelaskan penyelundupan satwa liar membuat WWF melakukan tindakan pencegahan untuk mengatasi tindakan tersebut sementara penelitian penulis menjelaskan kerusakan hutan yang sangat parah menjadi latar belakang dilakukannya upaya WWF dalam mengurangi praktik yang merusak lingkungan tersebut.

Referensi ke empat yang menjadi acuan bagi penulis adalah sebuah buku yang ditulis oleh tim dari badan penelitian dan pengembangan pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2010 yang berjudul membalik kecenderungan degradasi sumber daya lahan dan air yang mana pada bab ke tiga dibahas mengenai degradasi dan upaya pelestarian

²⁵ Dinda Ismaya, *Peranan WWF dalam mencegah terjadinya penyelundupan satwa liar di Indonesia*, Jurnal HI Universitas Negeri Riau, (2016), Vol 3 No 2

hutan.²⁶ Temuan yang penulis temukan dari buku ini adalah tingginya angka kerusakan hutan yang dialami oleh Indonesia dan faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya kebakaran dan perambahan hutan, *illegal logging* dan *illegal trading* yang didorong oleh tingginya permintaan kayu dan sumber daya kehutanan yang lain, konversi kawasan hutan dengan berbagai macam tujuan (pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, pemukiman dan lain sebagainya), penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan melalui pinjaman pakai kawasan hutan, dan pemanenan hasil hutan yang tidak memperhatikan prinsip prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL).

Dalam buku tersebut juga dijelaskan bagaimana upaya dan peran dari pemerintah selaku pihak yang mempunyai otoritas dalam hal pencegahan kerusakan hutan di Indonesia salah satunya melalui peraturan Menteri Kehutanan nomor: P70/Menhut-II/2009 diantaranya tentang pemantapan kawasan hutan, Rehabilitasi, pengamanan, konservasi dan revitalisasi kawasan hutan yang telah rusak dan berpotensi rusak di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada subjek yang diteliti, dimana dalam penelitian ini ia menjelaskan upaya negara melalui Kementerian kehutanan dalam menyelamatkan hutan Indonesia dengan terlebih dahulu menjelaskan kondisi hutan Indonesia secara umum sementara penelitian yang peneliti angkat mengenai peran serta upaya dari WWF sebagai sebuah aktor dalam Hubungan Internasional dalam menjalankan tugasnya menyelamatkan hutan Indonesia dari kerusakan.

²⁶Badan penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian, *Membalik kecenderungan degradasi sumber daya lahan dan air*, IPB Press, Bogor, 2010. Hal 67-86

Referensi terakhir yang menjadi acuan penulis adalah sebuah jurnal terbitan jurnal lingkaran widyaiswara yang ditulis oleh Fachmi rasyid pada Desember 2014 yang berjudul permasalahan dan dampak kebakaran hutan.²⁷

Tulisan ini mengangkat permasalahan dan dampak kebakaran hutan yang menjadi permasalahan lingkungan yang sangat penting di tanah air. Dampak dari kebakaran hutan adalah hilangnya berbagai manfaat ekosistem dari hutan dan potensi lain yang terkandung didalamnya termasuk keanekaragaman hayati. Dalam jurnal ini juga dijelaskan tentang faktor penting penyebab kebakaran hutan, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami misalnya adalah musim kering yang ekstrim yang disebabkan oleh dampak El-Nino. Sedangkan faktor manusia meliputi penggunaan api dalam persiapan lahan, adanya kekecewaan terhadap pengelolaan hutan, *illegal logging*, kebutuhan untuk makanan ternak, perambahan hutan, dan sebab-sebab lain.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti terletak pada masalah yang diteliti dan pihak-pihak yang berupaya dalam pencegahan masalah tersebut. Dalam penelitian Fahmi ini yang dibahas hanya masalah kebakaran hutan sementara masalah dalam penelitian peneliti tidak hanya membahas masalah pembakaran hutan saja melainkan pada cakupan yang lebih besar dari itu selain itu dalam jurnal Fahmi ini hanya berisi penjelasan tentang penyebab permasalahan hutan sementara penelitian yang peneliti teliti menggambarkan upaya dari sebuah NGO dalam mengatasi kerusakan hutan di Indonesia.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Environmental Non-governmental Organization(ENGO)

Menurut pemikiran kaum liberal, NGO berfungsi sebagai *public sphere* yakni sebagai tempat terjadinya berbagai debat publik mengenai suatu permasalahan publik dan dalam

²⁷Fahmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal lingkaran Widyaiswara (2014) edisi 1 no 4

politik internasional mampu memberikan pengaruh pada aktor hubungan internasional seperti melakukan advokasi terhadap pemerintah dan Organisasi Internasional, pembentukan politik dan agenda sosial, edukasi publik, memonitor perjanjian internasional dan kebijakan negara dengan fokus kritikan pada permasalahan global, serta mempunyai pengaruh dalam politik internasional.²⁸

Organisasi non-pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu organisasi yang bersifat Internasional (INGO) dan ada pula yang bersifat intra-nasional (NGO) perbedaan keduanya hanya terdapat pada keanggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatannya²⁹. Sebagian besar ahli Hubungan Internasional seringkali mendefinisikan INGO dengan merujuk pada definisi NGO seperti penjelasan Berridge dan James yakni; *“is a private, non profit making body which has an international membership such bodies especially when granted observer status are often active in international organization and major conferences....NGOs are sometimes referred to as international non governmental organization”*³⁰

Jadi berdasarkan definisi di atas INGO pada umumnya sama dengan NGO perbedaan hanya terletak pada ruang lingkup serta anggota organisasi dan mitra kerjanya saja. Dalam perkembangannya NGO dibedakan berdasarkan fungsi, ruang lingkup serta kegiatannya, dalam hal ini WWF tergolong kepada INGO yang berfokus pada masalah lingkungan.

Menurut Paul Wapner, NGO yang berfokus pada masalah lingkungan disebut Environmental Non-governmental Organization yang bekerja untuk melindungi lingkungan

²⁸Shamima ahmad and David potter, NGO in International Politics, USA, Kumarian Press Inc, 2006 Hal 37

²⁹Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT ERESKO, Bandung 1993 Hal 3

³⁰Berridge, GR, dan Alan James, *A dictionary of Diplomacy* New york palgrave Macmilan 2003 Hal 187

secara umum, seperti perlindungan terhadap satwa, dan tumbuh tumbuhan, perlindungan terhadap air, tanah, udara, dan lain sebagainya yang mencakup tentang lingkungan.³¹

1.7.2 Upaya ENGO

Dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan tersebut, Paul Wapner membagi tiga upaya yang dilakukan oleh ENGO:

1. Action to Change State Behavior

Negara merupakan aktor kunci dalam dunia politik dan dalam sistem Internasional. Dalam sistem Internasional saat ini, perilaku negara dipengaruhi oleh beberapa aktor lain, diantaranya adalah Environmental Non-government Organization (ENGO). ENGO secara umum akan membantu negara dalam membuat undang-undang untuk mengatasi berbagai macam masalah lingkungan.³² Indikator upaya mereka dalam mengubah kebiasaan negara diantaranya :

1. ENGO dapat mempengaruhi negara dengan ikut membuat suatu kesepakatan atau perjanjian internasional untuk mengatasi masalah lingkungan.
2. ENGO dapat menekan pemerintah dalam menetapkan aturan hukum dan regulasi mengenai perlindungan lingkungan
3. Melakukan penelitian ilmiah yang memberikan informasi ilmiah sehingga akan memberikan tekanan secara domestik maupun internasional untuk membangun rezim lingkungan.³³

³¹Paul Wapner, *The Transnational Politics, of environmental NGOs* 1997 Hal 3 United Nations University Symposium on The United Nations and the Global Environment,

³²Ibid Hal 7

³³Ibid

Dalam penulisan ini, penulis akan meneliti bagaimana usaha WWF untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan aturan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan di Indonesia khususnya di kawasan Taman Nasional Tesso Nillo.

2. Action to Engage Economic Forces

Dalam permasalahan ini, NGO berfungsi untuk mereformasi praktik ekonomi yang dapat merusak alam karena dengan meningkatnya aktivitas ekonomi akan berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Kegiatan ekonomi disini berkaitan erat dengan banyak pihak, bukan hanya negara tetapi masyarakat, perusahaan dan lainnya³⁴. Indikator yang dilakukan oleh NGO lingkungan dalam mempengaruhi dan merubah praktik ekonomi ini, dengan cara:

1. Memperkuat kebijakan dan sistem penegakan hukum untuk menurunkan angka pembakaran dan penebangan hutan.
2. Mengawasi praktik praktik ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan dan
3. Melakukan kampanye tentang aktivitas ekonomi yang pro lingkungan.³⁵

Dalam permasalahan ini penulis akan meneliti bagaimana upaya dari WWF dalam mereformasi praktik ekonomi yang dapat merusak hutan di Indonesia.

3. Action to Engage Social Mores

Dalam fungsi ini, ENGO dituntut untuk megajarkan pemikiran pemikiran yang bertujuan untuk mencintai alam dan lingkungan. Di tengah masyarakat tentu adanya sebuah budaya atau pemahaman yang keliru terhadap lingkungan³⁶. Indikator NGO lingkungan dalam konteks action to engage social mores adalah dengan cara:

³⁴Ibid, Hal 9

³⁵Ibid

³⁶Ibid Hal 12

1. Memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat dan mengkritisi adat atau budaya yang selama ini salah mengenai lingkungan
2. Mengubah pola pikir atau kebiasaan yang salah yang terjadi di masyarakat mengenai lingkungan.³⁷

Di Indonesia sendiri terdapat pola pikir masyarakat yang masih apatis terhadap masalah kerusakan hutan dan tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkannya, seperti maraknya penebangan pohon di hutan yang dilakukan oleh masyarakat karena mereka menganggap hutan adalah anugerah Tuhan dan bebas sesuka hati untuk diambil manfaatnya. Dalam penelitian ini kami akan melihat usaha dari WWF untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam menangani kasus kerusakan hutan di Indonesia khususnya di kawasan Taman Nasional Tesso Nillo.

Dengan demikian maka penulis akan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan WWF dalam menangani kasus kerusakan hutan di Indonesia khususnya di Taman Nasional Tesso Nillo.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan data data yang didapat dari tulisan ilmiah dan laporan laporan serta tindakan yang tergambar dari tulisan tulisan tersebut³⁸. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dimana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci.³⁹

³⁷Ibid

³⁸ Iskandar.2008. Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (Kualitatif dan kuantitatif). Jakarta: Gaung Persamda Press, 186

³⁹ibid

1.8.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada bagaimana peranan WWF dalam menangani masalah kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Penulis membatasi penelitian pada rentang waktu tersebut karena di tahun 2004 tersebut angka kawasan hutan Tesso Nilo resmi berstatus taman nasional dan kerusakan hutan tersebut terus terjadi dan berada pada level puncak pada tahun 2014. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo dan salah satunya adalah WWF.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah objek yang perilakunya akan dianalisis sedangkan tingkat analisis adalah unit yang menjadi landasan terhadap terhadap keberlakuan pengetahuan yang digunakan⁴⁰. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah ENGO, yakni WWF dan tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat domestik, yakni kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Sementara itu, unit eksplanasi dari penelitian ini adalah kerusakan hutan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Untuk data primer ini, peneliti akan mendapatkan data dengan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik memperoleh data dengan cara bertanya langsung kepada informan.⁴¹ Dalam menentukan sampel informan, penulis akan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini akan memberikan peluang

⁴⁰ Joshua S. Goldstein, Jon C. Pavhouse, *Level of analysis*. Pearson International Edition, International Relation, eight edition.

⁴¹ Bagong suyanto sutinah, *Metode Penelitian Sosial*. (Kencana Prenada media group, Jakarta 2005). Hal 71

kepada peneliti untuk menentukan informan secara subjektif dalam mempertimbangkan unit atau tujuan tertentu tanpa harus memilih sampel secara acak.⁴² Adapun pihak yang akan peneliti jadikan narasumber adalah perwakilan dari WWF Indonesia cabang Riau dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Sementara itu, data sekunder yang akan digunakan adalah data dan dokumen-dokumen tentang kerusakan hutan di Indonesia serta dampak atau bencana yang ditimbulkan dari kerusakan hutan tersebut yang dirilis resmi oleh WWF dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta data-data dari media.

1.8.5 Analisis dan Pengolahan Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas peneliti akan memulai dengan penjabaran mengenai WWF dan upaya yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai NGO yang bergerak dibidang lingkungan hidup(ENGO) dengan menggunakan indikator-indikator yang telah dijelaskan pada bagian kerangka konseptual diatas.

Pada bagian selanjutnya, proses analisis akan berangkat pada upaya upaya yang dilakukan ENGO yang dipaparkan oleh Paul Wapner dalam tulisannya yang berjudul *The transnational politics,of enviromental NGOs*.Dalam tulisan ini dijelaskan upaya upaya yang dilakukan oleh ENGO yang bekerja untuk melindungi lingkungan secara umum, upaya tersebut diklasifikasikan kedalam 3 point, adalah action to change state behavior,action to engange economic forces dan action to engange social mores⁴³

Berangkat dari upaya upaya yang dilakukan oleh ENGO,peneliti memulai dengan memaparkan upaya pertama yaitu Action to Change State Behavior,upaya ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh ENGO dalam pelestarian lingkungan hidup, seperti

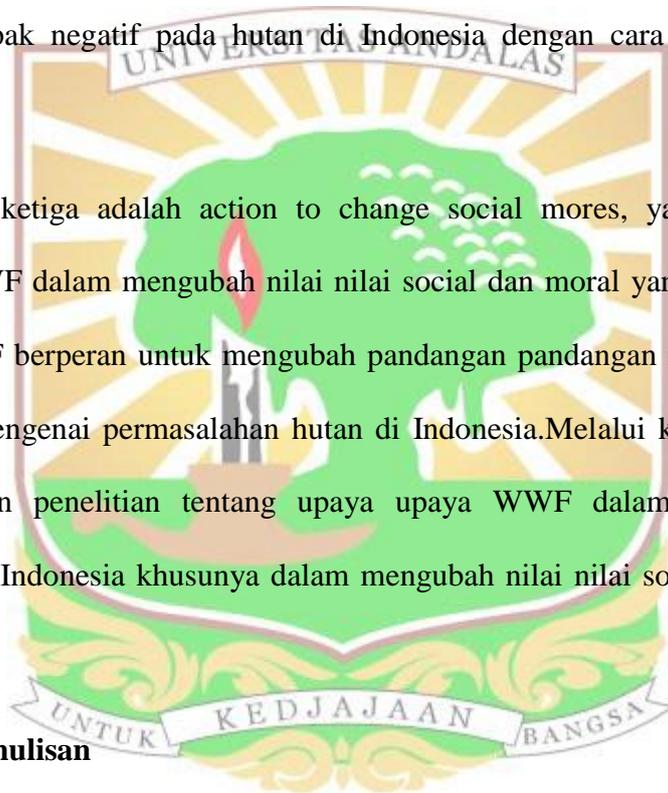
⁴²*ibid*

⁴³Paul wapner,The Transnational politics,of environment

yang telah dijelaskan diatas konsep ini menggambarkan bagaimana sebuah ENGO bisa berperan dalam mengubah kebiasaan negara yang berdampak pada penyelamatan hutan di Indonesia.

Konsep kedua adalah action to engage economic forces, dalam konsep tersebut akan dijelaskan tentang bagaimana sebuah ENGO dapat mengubah atau mengurangi kekuatan ekonomi yang dapat merusak lingkungan dalam penelitian ini WWF sebagai sebuah ENGO akan dianalisis perannya dalam mengubah atau mengurangi kekuatan ekonomi yang menimbulkan dampak negatif pada hutan di Indonesia dengan cara mereformasi praktik praktik ekonomi.

Pada point ketiga adalah action to change social mores, yaitu upaya upaya yang dilakukan oleh WWF dalam mengubah nilai nilai social dan moral yang ada di masyarakat, dalam hal ini WWF berperan untuk mengubah pandangan pandangan negatif yang diterima oleh masyarakat mengenai permasalahan hutan di Indonesia. Melalui konsep ini akan dapat terjawab pertanyaan penelitian tentang upaya upaya WWF dalam mengatasi masalah kerusakan hutan di Indonesia khususnya dalam mengubah nilai nilai sosial dan moral dalam masyarakat.



1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian ini diteliti, di bagian ini juga sedikit peneliti paparkan tentang masalah umum hutan indonesia (berupa angka kerusakan hutan dunia dan Indonesia), sekilas profil tentang WWF global dan WWF indonesia dan bagian bagian lainnya yang menjadi syarat dalam penulisan sebuah karya ilmiah.

BAB II :Kerusakan hutan di Indonesia dan kerusakan hutan di Taman Nasional

Tesso Nillo serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan.

Pada BAB II ini peneliti mencoba memberikan gambaran kongkrit dari isu yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, yaitu permasalahan hutan di Indonesia. Dalam BAB ini peneliti akan menguraikan data data mengenai masalah kerusakan hutan yang terjadi Indonesia dan dampak dampak yang terjadi apabila kerusakan hutan tersebut terus dibiarkan pada bagian ini juga akan dibahas sebagian dari aktor aktor yang terlibat dalam kerusakan hutan di Indonesia.

BAB III :WWF sebagai ENGO di Indonesia

Setelah dibagian atas membahas mengenai permasalahan dan isu yang akan dikaji, pada BAB III peneliti akan membahas tentang organisasi WWF sebagai subjek penelitian. Di bagian ini peneliti akan membahas tentang sejarah awal berdirinya WWF global dan WWF indonesia, program kerja WWF secara umum sehingga mereka bisa dikatakan sebagai ENGO di indonesia.

BAB IV :Analisa upaya WWF dalam mengatasi kerusakan hutan di

Indonesia khususnya di Taman Nasional Tesso Nillo

Di bagian BAB IV ini peneliti akan menjabarkan dan menganalisa mengenai upaya upaya yang dilakukan oleh WWF Indonesia dalam mengatasi masalah kerusakan hutan di Indonesiakhususnya di Taman Nasional Tesso Nillo melalui konsep yang dijabarkan oleh Paul wapner tentang upaya-upaya ENGO.